

Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern

Salsabila Nurmaulida Syifa¹, Nurul Fitria², Rini Puji Astuti³

Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹salsabilasyifa162@gmail.com, ²nurulfitria11.nf@gmail.com, ³rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Sejarah Bank Indonesia (BI) berawal dari De Javasche Bank (DJB) yang didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bank sirkulasi untuk mencetak dan mengedarkan Gulden Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, desakan untuk memiliki bank sentral nasional mendorong nasionalisasi DJB pada tahun 1951. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 1953, DJB diubah menjadi Bank Indonesia, dengan peran utama dalam pencetakan uang, pengelolaan kebijakan moneter, dan pengawasan sistem pembayaran. Reformasi besar terjadi pasca krisis moneter 1997-1998, ketika BI memperoleh independensi penuh melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, memperkuat perannya dalam menjaga kestabilan nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. BI kini berperan dalam pengelolaan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, BI-Fast, dan proyek rupiah digital, mencerminkan adaptasi terhadap tantangan global dan teknologi keuangan modern.

Kata Kunci: Sejarah dan Evolusi Bank Sentral, Kebijakan Moneter

PENDAHULUAN

Sejarah bank sentral tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum. Awal mula keberadaan bank sentral berakar pada kebutuhan masyarakat untuk memiliki media pertukaran yang lebih efisien dibandingkan sistem barter. Pada masa awal peradaban, alat tukar yang digunakan adalah uang logam, seperti emas, perak, dan perunggu, yang memiliki nilai intrinsik setara dengan berat dan jenis materialnya. Misalnya, jika uang logam emas seberat 1gram memiliki nilai 1000, maka nilai tersebut diakui secara luas sesuai dengan berat emas tersebut ketika diperdagangkan. Sistem ini menggantikan bentuk pertukaran sebelumnya yang kurang praktis dan seringkali tidak seimbang.¹

Namun, seiring dengan berkembangnya perdagangan dan ekonomi global, penggunaan uang logam mulai menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan sumber daya alam untuk mencetak uang logam dalam jumlah besar. Hal ini memicu kebutuhan akan bentuk uang yang lebih ringan, lebih mudah dibawa, dan lebih fleksibel, sehingga memunculkan konsep uang kertas. Uang kertas awalnya diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai penjamin nilai, yang kemudian berkembang menjadi institusi perbankan. Dalam praktiknya, bank pada masa itu mencetak uang kertas berdasarkan cadangan logam mulia yang mereka simpan, namun tanpa adanya standar pengelolaan yang jelas dari pemerintah, praktik ini sering menimbulkan risiko fraud dan penyimpangan nilai yang merugikan nasabah.

Kesadaran akan pentingnya regulasi ini kemudian mendorong pembentukan bank sentral, yang memiliki peran utama dalam menjaga kestabilan nilai mata uang, mengelola kebijakan moneter, serta memastikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Di Indonesia, sejarah bank sentral diawali dengan pendirian De Javasche Bank (DJB) pada tahun 1828 oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang berfungsi mencetak dan mengedarkan mata uang Gulden di wilayah Hindia Belanda². DJB memiliki hak eksklusif untuk mencetak dan mengedarkan uang hingga kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, desakan untuk memiliki bank sentral nasional semakin kuat sebagai simbol kedaulatan ekonomi. Proses nasionalisasi DJB dimulai pada tahun 1951 melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi didirikan sebagai bank sentral melalui UU No. 11 Tahun 1953, menggantikan fungsi DJB. Sejak saat itu, Bank Indonesia berperan tidak hanya sebagai bank sirkulasi, tetapi juga sebagai bank komersial yang menyediakan kredit untuk pembangunan nasional. Pada masa ini, kebijakan moneter dikelola oleh Dewan Moneter yang diketuai oleh Menteri Keuangan, dengan Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia dimulai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 yang menetapkan tujuan utama Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Amandemen pada tahun 2004 memperkuat independensi Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Selain itu, pada tahun 2008, perubahan UU No. 23 Tahun 1999 menambahkan peran penting Bank Indonesia dalam

¹ Syaiful Anwar, *Bank dan Lembaga Keuangan*, CV Green Publisher Indonesia, (Payukumbuh, 20 oktober 2022;48)

² Caroline, Amalia Indah Fitriana, Wiwi Warsita, dll, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cetakan pertama, Penerbit Insani, (Cirebon, Desember 2021;209)

menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk pengelolaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek untuk menghadapi krisis keuangan global.

Transformasi ini mencerminkan perjalanan panjang Bank Indonesia dari institusi kolonial menjadi bank sentral modern yang berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional di era global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami evolusi kelembagaan dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral modern. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam dinamika perubahan fungsi dan mandat Bank Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup analisis dokumen sejarah, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan Bank Indonesia, serta publikasi resmi yang relevan. Selain itu, data sekunder dari buku, artikel ilmiah, dan sumber arsip terkait sejarah Bank Indonesia digunakan untuk memperkaya konteks historis. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola perubahan struktural dan kelembagaan, termasuk pengaruh berbagai kebijakan ekonomi terhadap stabilitas moneter dan perkembangan sistem keuangan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah awal bank sentral di Indonesia

Sejarah diawali ketika Raja William I dari Belanda memberikan hak untuk mendirikan sebuah bank swasta tahun 1826 di Hindia Belanda dengan nama De Javasche Bank (DJB, Bank of Java). Bank ini didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 sebagai bank sirkulasi Hindia Belanda dengan fungsi mengatur dan menerbitkan gulden Hindia Belanda.³ Selain itu, DJB juga bertugas menyimpan kas pemerintah colonial dan melakukan aktivitas perbankan komersial terbatas. Meski belum menjadi bank sentral dalam arti modern, DJB telah menjalankan fungsi penting dalam sistem keuangan colonial, seperti menjaga kestabilan mata uang, menyelenggarakan sistem kliring dan mengatur peredaran uang.⁴

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia mengalami kesenjangan kelembagaan dalam sektor keuangan. De Javasche Bank masih beroperasi hingga akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1951. Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1953, nama De Javasche Bank resmi diubah menjadi Bank Indonesia (BI) dan ditetapkan sebagai bank sentral Indonesia.⁵

Dengan UU tersebut, BI diberikan mandat untuk:

- Mencetak dan mengedarkan uang rupiah
- Mengatur kebijakan moneter
- Mengawasi sistem pembayaran
- Mendukung Pembangunan nasional⁶

Perkembangan Kelembagaan dan Fungsi Bank Indonesia

- Periode 1953-1966: Peran Ganda dan Ketergantungan pada Pemerintahan

Pada awalnya, BI masih melaksanakan fungsi bank sentral dan bank komersial secara bersamaan. Selain itu, BI belum memiliki independensi karena secara struktural tunduk kepada kebijakan fiskal pemerintah. Periode ini ditandai oleh pembiayaan deficit anggaran oleh BI, yang menyebabkan inflasi tinggi.

- Periode 1966-1997: Penyesuaian Pasca Orde Lama dan Perkembangan Sistem Keuangan

Dalam masa orde baru, reformasi dilakukan termasuk mengarahkan BI agar lebih fokus pada pengendalian moneter. Fungsi pengawasan perbankan mulai diperkuat dan BI tidak lagi menjalankan fungsi perbankan komersial. Namun, BI masih belum sepenuhnya independen secara kelembagaan. Banyak kebijakan moneter yang tetap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan fiskal, khususnya dalam hal pembiayaan defisit dan kontrol kredit.

- Reformasi 1998: Titik Balik Peran dan Kelembagaan BI

Krisis moneter 1997-1998 menjadi momentum besar dalam Sejarah BI. Pemerintah dan DPR merespons dengan mengesahkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi BI sebagai bank sentral.⁷ UU ini menyatakan bahwa:

- BI bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain
- Tujuan utama BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

³ Faizul Abrory, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) halaman 56, <http://repository.uki.ac.id/10840/1/BankSentraldanIndependensinya.pdf>

⁴ Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia*, 2020, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/bi-dulu/sejarah/Default.aspx>, diakses 17 mei 2025

⁵ OJK, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia*, (Jakarta, 1 feb 2013), <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/Undang-Undang/Documents/330.Pdf>, diakses 17 mei 2025

⁶ Suarpika Bimantoro, Endang R. Budiastuti, *Kelembagaan Bank Sentral*, <https://repository.ut.ac.id/3984/1/ESPA4421-M1.pdf>, 24

⁷ Bambang Murdadi, *Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan*, Jurnal Unimus, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/vadded/article/viewFile/726/780>, 9-10

- c. Fungsi pengawasan perbankan masih berada di bawah BI (hingga 2011)

Tantangan dan Inovasi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Modern

1. Perluasan Mandat: dari Moneter ke Makroprudensial

Seiring berkembangnya sistem keuangan dan tantangan globalisasi, BI tidak hanya mengatur moneter tapi juga sistem keuangan secara makro. Pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2009, BI memperoleh mandat makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.⁸ Meski pengawasan makroprudensial beralih ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2011, BI tetap memegang peran penting dalam sistem keuangan melalui fungsi:

- Stabilitas moneter
- Stabilitas sistem pembayaran
- Inklusi keuangan
- Inovasi sistem pembayaran digital⁹

2. Digitalisasi dan Inovasi Sistem Pembayaran

Bank Indonesia mengembangkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang mendorong transformasi digital dalam ekonomi dan keuangan nasional, contohnya:

- Implementasi QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)
- Pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) melalui proyek digital rupiah
- Penguatan sistem BI-Fast untuk mempercepat dan mengefisienkan transaksi antar bank¹⁰

3. Peran BI dalam Ekonomi Berkelanjutan dan Global

Bank Indonesia juga mulai menyesuaikan kebijakannya dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*green economy*), serta aktif dalam forum-forum internasional seperti G20 dan ASEAN+3.

KESIMPULAN

Sejarah dan evolusi Bank Indonesia mencerminkan perjalanan Panjang dan kompleks dari Lembaga colonial Bernama De Javasche Bank menuju sebuah bank sentral modern yang independent dan adaptif terhadap tantangan zaman. Perubahan ini terjadi secara bertahap, dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi dan krisis yang mendorong reformasi kelembagaan secara struktural.

Transformasi Bank Indonesia dengan nasionalisasi DJB pada tahun 1951 dan pembentukan BI sebagai bank sentral. Selama beberapa decade, BI beroperasi di bawah pengaruh politik dan menjalankan fungsi ganda. Namun krisis moneter 1998 menjadi titik balik yang mendorong disahkannya UU No. 23 Tahun 1999, yang memberikan independensi kepada BI dan memperjelas mandata utamanya yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. BI terus memperluas perannya, tidak hanya dalam kebijakan moneter tetapi juga sistem pembayaran dan stabilitas keuangan. Inovasi seperti BI-Fast, QRIS dan pengembangan rupiah digital menunjukkan kemampuan adaptif BI terhadap dinamika teknologi keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Demikianlah hasil penelitian kami, kami harap penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Payukumbuh: CV Green Publisher Indonesia.
- Caroline, A. I., & 209). (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cirebon: Penerbit Insani.
- Faizul Abrory, d. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Indonesia, B. (2020). *Sejarah Bank Indonesia*, . Diambil kembali dari BI: <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>
- Murdadi, B. (t.thn.). Independensi Bank Indonesia Di Persimpangan Jalan. *Jurnal Unimus*, 9-10.
- OJK. (1, Februari 2013). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/Undang-Undang/Documents/330.Pdf>
- Suarpika Bimantoro, E. R. (t.thn.). Kelembagaan Bank Sentral,. *Modul*, 24.

⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan UU BI

⁹ OJK, *Penguatan Koordinasi Kebijakan Sistem Keuangan Indonesia*, Laporan Tahunan OJK 2022

¹⁰ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, Jakarta: BI Press, 2019